

# BAB I PENDAHULUAN

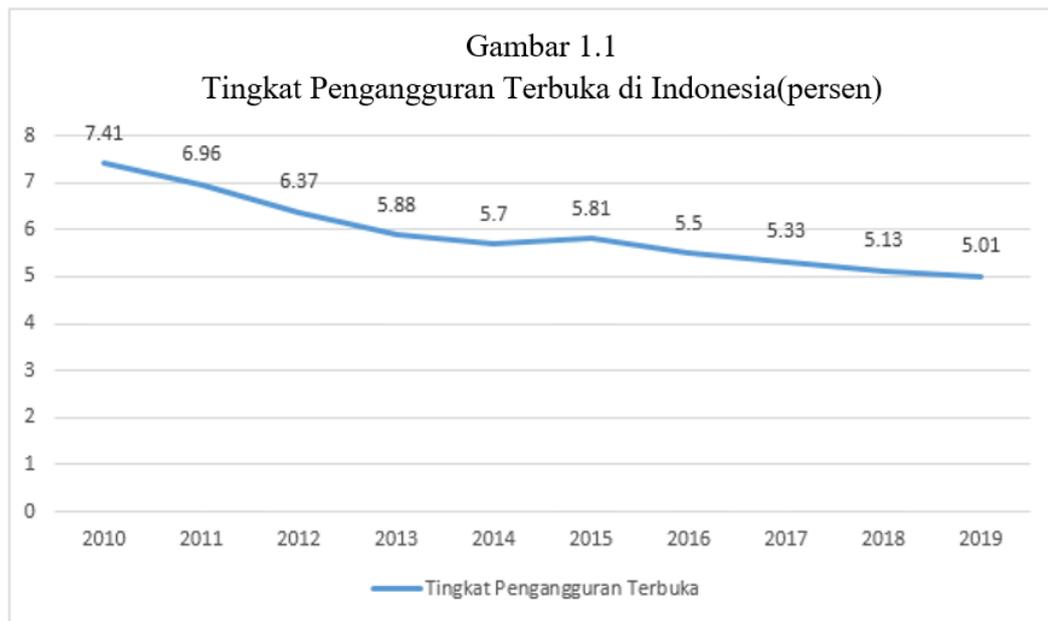
## 1.1 Identifikasi Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami berbagai kendala yang harus diselesaikan. Pengangguran termasuk salah satu dari berbagai macam kendala yang harus diselesaikan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Penduduk Indonesia yang banyak merupakan sumber tenaga kerja yang harusnya menjadi penggerak ekonomi bangsa, tetapi sampai kondisi saat ini penduduk yang melimpah dan angkatan kerja yang terus meningkat malah menjadi penghambat bergeraknya roda ekonomi bangsa dan penghalang negara dalam pembangunan. Setiap tahun, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5%. Pengangguran harus segera diatasi, karena akan berdampak kepada beban sosial (Kurniawan, 2013).

Angka pengangguran yang rendah menjadi cita-cita seluruh negara di dunia, namun realitanya pada perekonomian pengangguran ini selalu ada walaupun keadaan perekonomian negara baik-baik saja. Jika masalah pengangguran ini lambat untuk diatasi maka akan terjadi kerawanan dalam sosial dan mempunyai potensi untuk memperparah kemiskinan (BPS, 2015). Pengangguran telah menjadi topik pembicaraan sejak lama. Pengangguran digambarkan sebagai individu yang telah masuk usia tertentu tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dan sedang mencoba menemukan pekerjaan untuk mendapatkan uang atau menerima tunjangan. Pengangguran muncul ketika jumlah orang yang sedang mencoba menemukan pekerjaan melebihi dari jumlah pekerjaan yang ada (Sukirno, 2004).

Pengangguran yang tinggi juga disebabkan oleh standar tinggi yang diharapkan dari perusahaan yang berusaha menarik para pencari kerja. Banyak perusahaan mengharuskan pencari kerja untuk menyelesaikan diploma atau sarjana. Padahal pada tahun 2010 sampai tahun 2019 rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia tidak lebih dari 9 tahun yang jika dikalkulasikan tidak lulus sekolah menengah pertama (SMP) dan harapan lama sekolah (HLS) di Indonesia tidak lebih dari 13 tahun yaitu tamat sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK). Oleh

karena itu, pengangguran merupakan tanggung jawab bersama, dan secara khusus untuk pemerintah harus mempunyai cara untuk memperbaiki dan segera menyelesaikan kondisi kehidupan masyarakatnya dengan mengembangkan langkah-langkah yang sistematis dan strategis untuk mengatasi masalah pengangguran.

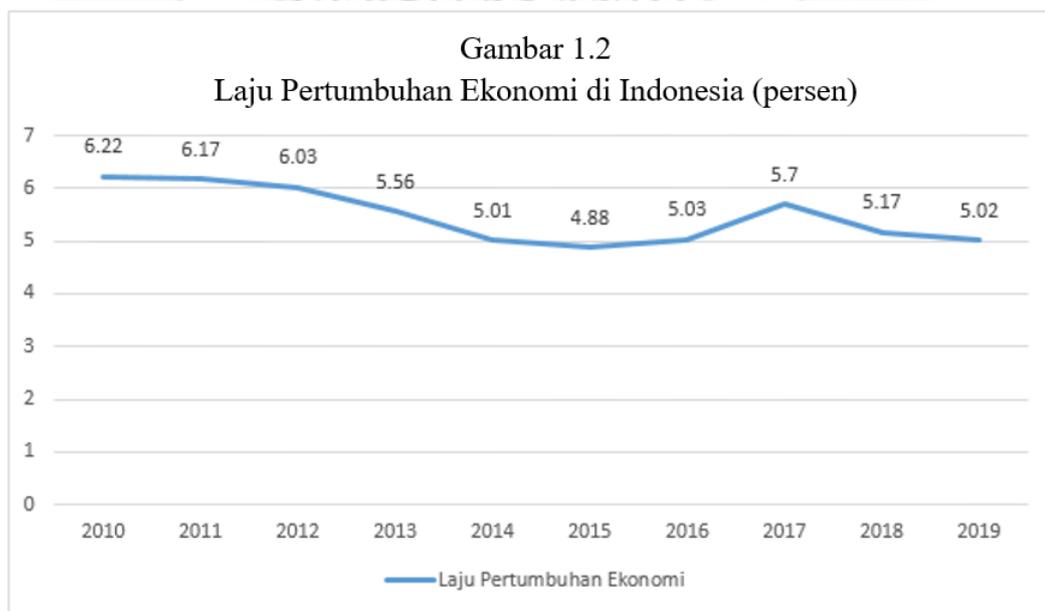


*Sumber: BPS 2021*

Pada gambar 1.1 bisa dilihat bahwa di tahun 2019 tingkat pengangguran nasional berada pada angka 5,01% sedangkan ada beberapa provinsi di Indonesia yang tingkat penganggurannya melebihi angka 6% seperti: Aceh 6,17%, Kep. Riau 7,5%, DKI Jakarta 6,54%, Jawa Barat 8,04%, Banten 8,11%, Sulawesi Utara 6,01%, Maluku 6,69%, Papua Barat 6,43%. Padahal jika dilihat secara nasional tingkat pengangguran nasional sudah dibawah 6% dari tahun 2013, dan cenderung turun hingga tahun 2019 walaupun pada tahun 2015 lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 0,11%.

Dapat dikatakan bahwa besar kecilnya tingkat pengangguran sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena tingkat pengangguran adalah ukuran seberapa baik orang dalam melakukan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari pembangunan ekonomi. Pengangguran layak didiskusikan karena terkait dengan sejumlah faktor ekonomi lainnya. Diantaranya

faktor tersebut adalah upah minimum provinsi, pendidikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Sirait, 2013). Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah semakin besar pertumbuhan ekonomi sebuah negara, semakin banyak investasi modal yang akan mengalir ke negara itu, sehingga menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan, yang ditunjukkan dengan banyaknya sektor usaha baru dengan sistem yang kuat yang menyerap tenaga kerja sekelompok besar individu (Kurniawan 2013).



*Sumber: BPS 2021*

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berfluktuatif namun cenderung menurun, pada tahun 2010 mengalami laju pertumbuhan yang tertinggi yaitu 6.22 persen dan pada tahun 2015 mengalami laju pertumbuhan yang paling kecil yaitu 4.88 persen selama periode 2010 sampai 2019.

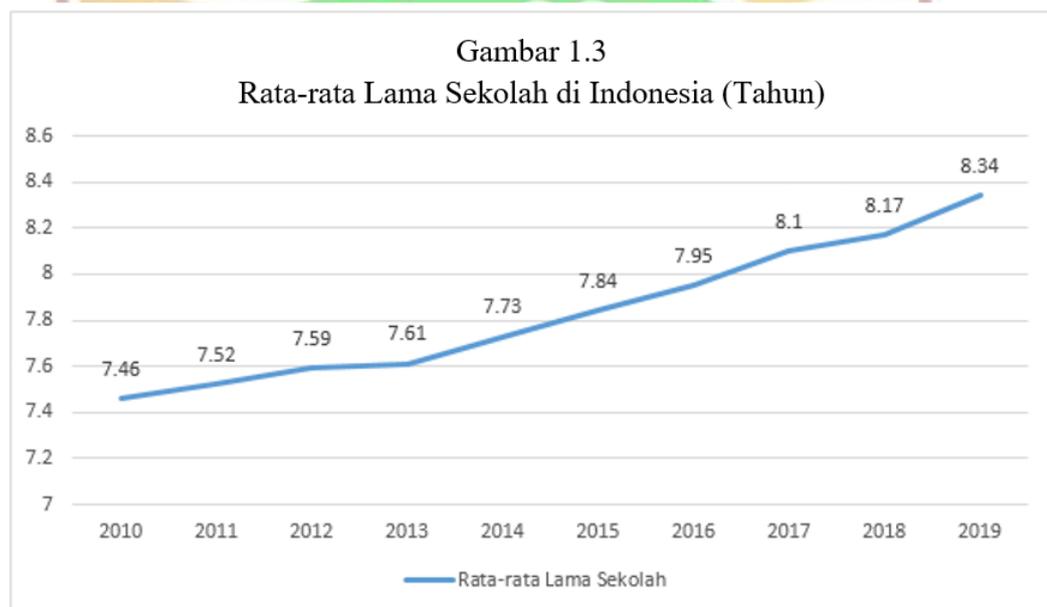
Pertumbuhan ekonomi makro didefinisikan sebagai peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto), yang artinya juga kenaikan pada pendapatan nasional (Tambunan, 2003). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berguna untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja ekonomi, terutama ketika menganalisis hasil pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Perekonomian akan tumbuh jika produksi produk dan jasa tumbuh dibandingkan

tahun sebelumnya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mengacu pada seberapa banyak kegiatan ekonomi dapat mewujudkan kekayaan baru atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Berlanjutnya pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau daerah mengartikan bahwa negara atau tempat itu mengalami perkembangan ekonomi yang sehat.

Hak pekerja atau buruh atas kompensasi atas kerja mereka dikenal sebagai upah. Besaran upah yang diberikan seringkali ditentukan oleh suatu kesepakatan atau dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam situasi ini, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30 mengatur tentang gaji. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagai sarana untuk melindungi pekerja. Upah minimum merupakan tolak ukur yang digunakan oleh pemilik perusahaan dan pelaku industri lainnya untuk menentukan besarnya upah yang harus dibayarkan kepada karyawan di tempat kerjanya. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja, termasuk keseimbangan daya beli (*balance of spending ability*), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah (margin antara 50% upah/salary tertinggi). Penetapan ini dilakukan setiap tanggal 1 November dan berlaku untuk tahun berikutnya karena pemenuhan kebutuhan terendah di setiap provinsi berbeda-beda. Data-data tersebut bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum memiliki hubungan langsung terhadap tingkat pengangguran: semakin besar gaji yang ditentukan oleh pemerintah, semakin sedikit pekerja di negara tersebut. Ini terjadi karena gaji yang tinggi berdampak pada biaya output suatu perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan memangkas biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerjanya (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Menurut Mankiw (2003), kekakuan upah, atau kurangnya kemampuan gaji untuk beradaptasi sehingga penawaran tenaga kerja melebihi permintaan, merupakan faktor yang mempengaruhi pengangguran. Menetapkan upah minimum yang lebih rendah akan mendorong bisnis untuk mempekerjakan lebih banyak orang, yang akan membantu mengurangi pengangguran. Dalam *The General Theory*, Keynes menulis bahwa pekerjaan hanya akan meningkat jika tingkat upah diturunkan (Mankiw, 2003).

Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan besarnya upah minimum, tingkat pendidikan juga berperan dalam tingkat pengangguran. Menurut Elfindri (2001), hubungan antara pendidikan dan tingkat pengangguran adalah pendidikan bisa mempengaruhi kasta pekerjaan individu karena seseorang dengan kasta pendidikan yang lebih baik akan lebih mungkin untuk menerima pekerjaan yang lebih bergengsi dan oleh karena itu, di satu sisi dapat memenuhi kebutuhan hidup, di sisi lain juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Juga, jika seseorang memiliki pendidikan tinggi, situasi pengangguran tidak akan lebih buruk daripada seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan mereka juga dapat memperoleh upah yang mendekati batas upah minimum.



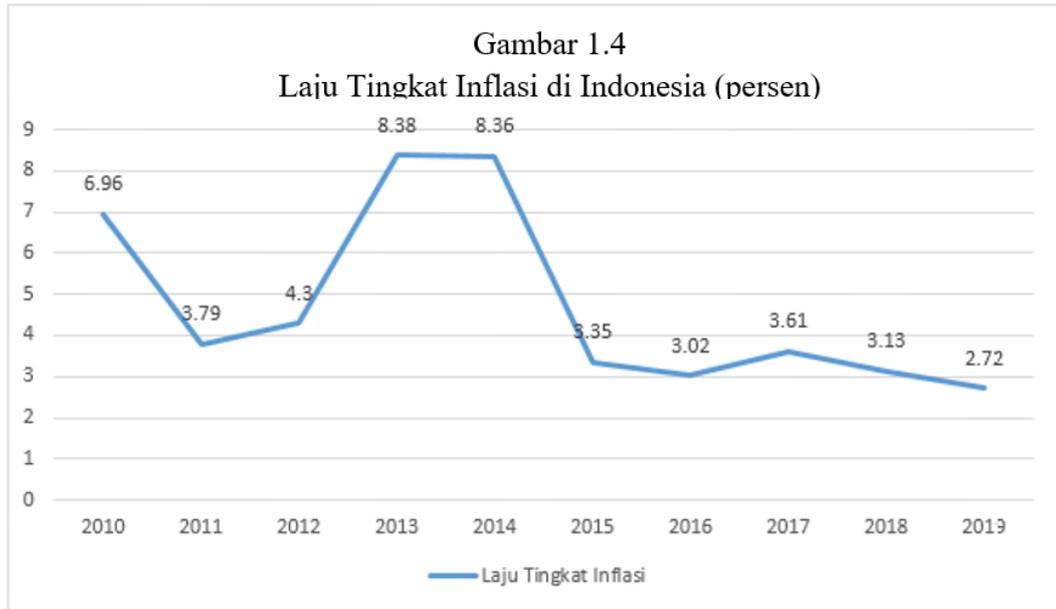
*Sumber: BPS 2021*

Tingkat pendidikan suatu wilayah bisa dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Menurut BPS rata lama sekolah merupakan banyaknya tahun belajar masyarakat yang berusia 15 tahun keatas yang ditempuh di pendidikan formal (tahun pengulangan tidak termasuk). Tingginya angka rata lama sekolah menyatakan tangga pendidikan yang telah diduduki oleh individu, semakin tinggi angka rata lama sekolah maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah dia tempuh. Pada gambar 1.3 rata lama sekolah di Indonesia cenderung naik pada periode 2010 sampai 2019. Kenaikan yang pesat bisa dilihat dari tahun 2013 yang

setiap tahunnya angka RLS meningkat lebih dari 0,1 tahun di setiap tahunnya. Namun angka yang tiap tahun meningkat ini tidak bisa dikatakan memenuhi atau jauh dari target tingkat pendidikan di Indonesia yang dimana sejak tahun 2009 sudah diberlakukan wajib belajar 12 tahun tapi kenyataannya pada tahun 2019 RLS di Indonesia tidak lebih dari 9 tahun.

Indikasi kenaikan tingkat harga umum yang berkelanjutan adalah inflasi. Dari perspektif ini, kenaikan harga sementara tidak dapat disebut sebagai inflasi. Isu inflasi ini secara konsisten mempengaruhi semua negara di dunia. Akibatnya, salah satu indikator baik buruknya perekonomian suatu negara adalah tingkat inflasi yang ada di sana. Tingkat inflasi untuk negara-negara dengan ekonomi yang kuat bervariasi dari 2 hingga 4 persen per tahun. Inflasi rendah didefinisikan sebagai tingkat inflasi antara 2 dan 4 persen. Selanjutnya, tingkat inflasi antara 7 dan 10 persen disebut sebagai inflasi parah. Namun, beberapa negara mengalami tingkat inflasi yang lebih parah atau sangat tinggi, seperti Indonesia pada tahun 1966 yang memiliki tingkat inflasi 650 persen. Hiperinflasi (*hyperinflation*) adalah istilah untuk inflasi yang sangat tinggi (Amir, 2009).

Tingkat inflasi yang tinggi dalam perekonomian dapat mempengaruhi produksi dan kesempatan kerja. Tingkat pengangguran bisa dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Pengangguran yang tinggi dapat dihasilkan dari inflasi yang tinggi, yang menunjukkan bahwa lebih sedikit peluang kerja yang diciptakan, dengan kata lain lebih sedikit individu yang akan dipekerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengembangkan kebijakan makro yang sesuai. Biaya produk jadi dan jasa akan naik seiring dengan kenaikan tingkat inflasi, yang juga akan meningkatkan output perusahaan maka para pengusaha akan mengambil keputusan untuk mengatasinya dengan cara mengurangi karyawan sehingga terciptalah pengangguran. Berikut keadaan inflasi di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2019.



*Sumber: BPS 2021*

Pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia sangat berfluktuatif dari tahun 2010 sampai 2019. Tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan inflasi yang cukup tinggi yaitu dari 4,3 persen ke 8,38 persen sekaligus menjadi inflasi tertinggi pada periode ini dan hanya turun sedikit di tahun 2014 menjadi 8,36 persen, namun pada tahun 2015 inflasi di Indonesia turun cukup signifikan ke angka 3,35 persen dan ke tahun selanjutnya sampai tahun 2019 inflasi di Indonesia cenderung stabil dibawah 4 persen.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas, perhatian secara menyeluruh dan konsisten harus diberikan kepada masalah seperti pengangguran, inflasi, tingkat pendidikan, tingkat upah dan laju PDRB untuk penciptaan dan menyerap tenaga kerja. Karena dengan memberikan kesempatan yang sama bagi penduduk untuk memasuki kegiatan perekonomian merupakan sebuah prioritas dalam membangun ekonomi. Untuk melihat fenomena ini peneliti merumuskan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh dari laju pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh dari upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh dari inflasi terhadap pengangguran terbuka di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Umum Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh dari pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh dari pertumbuhan PDRB terhadap pengangguran terbuka di Indonesia.
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh dari upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Indonesia.
4. Menganalisis dan mengetahui pengaruh dari inflasi terhadap pengangguran terbuka di Indonesia.

